

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA PALU

Dhian Putriani

(Mahasiswa Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aimed at finding out the implementation of finance balance policy between central government and regional government in regional autonomy era in Palu City. This was descriptive research with the type of field research. Data sources or informants were SKPD leader or finance sub unit leaders in Regional Secretariat of Palu City, the head of Regional Development Planning Board, and the head of Regional Income Official of Palu City. Data sources of this research consisted of primary and secondary data that were collected through observation, interview, and documentation. The data were analyzed by using qualitative analysis, organizing data and information based on facts obtained in the field, and by adopting descriptive analysis, getting the detail description of research object through the steps: data editing, data category, data interpretation, and formulating conclusion of this research. The result showed that the implementation of finance balance policy between central government and regional government in regional autonomy era in Palu City had been running well based on the criteria: communication, resources, disposition/character, and bureaucracy hierarchy.

Key words: *implementation of policy, finance balance, central government, local government.*

Kebijakan yang dilakukan pemerintahan berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu tidak terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, landasan pemberian otonomi kepada daerah dan pembentukan Daerah Otonom adalah Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 yang berbunyi "Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Adanya upaya untuk memperluas otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kedua undang-undang tersebut sebagai sebuah kecenderungan yang menjanjikan sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintah kota dan kabupaten termasuk Kota Palu. Dikatakan menjanjikan karena berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, pengadilan, agama dan lain-lain yang dianggap strategis secara nasional. Dan berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 memungkinkan terciptanya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian kedua undang-undang tersebut memungkinkan terwujudnya peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Untuk mencapai atau mendekati tujuan ideal desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah ada tiga persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh yaitu: (1) komitmen pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah, (2) pengaturan hubungan pusat dan daerah berdasarkan itikad untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah bukan sebaliknya, dan (3) perubahan perilaku elit lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keuangan negara dan keuangan daerah sebenarnya mempunyai pengertian yang sama karena mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana keuangan daerah hanya terbatas pada terbatasnya wilayah yaitu untuk wilayah sebuah daerah baik daerah propinsi ataupun daerah kabupaten/kota. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka (1) yaitu : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kehadiran UU No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” merupakan bukti dari keinginan politik Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Pada pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 disebutkan: (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan; (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan; (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lebih jauh pada pasal 10 disebutkan bahwa: (1) Dana Perimbangan terdiri atas

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Fenomena empirik tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk melihat, mengkaji dan menganalisis masalah implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, adalah didasari pada data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 besarnya jumlah Pendapatan Kota Palu adalah sebesar Rp.486.758.241.466,00,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.8.497.619.405,00,- Dana Perimbangan Rp.461.664.540.061,00,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.16.596.082.000,00,- sehingga tampak bahwa perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah di Kota Palu memiliki ketimpangan yang cukup besar yaitu 95% pembiayaan masih bersumber dari pusat dan 5% bersumber dari daerah yang seharusnya idealnya dalam konsep otonomi daerah pembiayaan dari pusat 35% dan dari daerah 65%. Kemudian dari Dana Perimbangan tersebut terbagi lagi atas dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.27.226.540.061,00 (6%), kemudian Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 365.480.000.000,00 (79%) dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.68.958.000.000,00 (15%) (Sumber: Biro Keuangan Sekretaris Daerah Kota Palu, tahun 2012).

Melihat pada fenomena empirik tersebut nampak bahwa ada ketimpangan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, dimana pembiayaan pembangunan di Kota Palu sebagian besar masih didanai oleh dana perimbangan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil ketimpangan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan ter-

hadap kemampuan Pemerintah Kota Palu dalam mengimplementasikan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu yang nantinya dijadikan sumber pendanaan pembangunan di wilayah Kota Palu.

METODE

Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sehingga penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan objek yang diteliti dalam rangka memberikan penjelasan dan gambaran tentang implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

Sesuai rumusan masalah dalam rancangan tesis ini, maka tipe penelitian adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan unit analisa implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

Informan dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yakni mengolah data dan informasi sesuai dengan kenyataan yang didapatkan di lokasi penelitian seperti editing data, kategori data, penafsiran makna data, dan perumusan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kota Palu

Melalui payung hukum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara mandiri sebagai upaya memajukan pembangunan di daerah. Dalam Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Kemudian dijelaskan pula bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Keberhasilan implementasi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Kota Palu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Edwards III (dalam Sudarsono, 2007: 90) memberikan sebuah pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor/variabel, yakni: 1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi/Watak; dan 4) Struktur Birokrasi, dimana keempat faktor/variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Berbekal pada pandangan di atas, maka dalam konteks penelitian ini penulis akan menganalisis Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kota

Palu ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/watak dan struktur birokrasi.

Faktor Komunikasi

Pada konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu ditinjau dari faktor komunikasi akan diukur dengan indikator rapat antar instansi terkait, rapat internal dinas dan pertemuan instansi terkait dengan pihak ketiga. Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut di atas, maka peneliti melakukan observasi untuk mengetahui seberapa besar peranan faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, yang didukung pula hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian berdasarkan pada pedoman wawancara yang ada.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, maka peneliti melihat bahwa dalam rapat antar instansi terkait, rapat internal dinas dan pertemuan antara instansi terkait dengan pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengelola dana perimbangan tersebut, yang dibahas adalah kemampuan yang dimiliki unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, selaku implementor dalam mengkomunikasikan dan menetapkan pengelolaan dana perimbangan yang meliputi pengelolaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Pengelolaan Dana Alokasi Umum yang dibahas sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, meliputi belanja rutin dalam hal ini pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan honor, perjalanan dinas para pejabat dan pembiayaan kegiatan-kegiatan administrasi instansi-isntansi teknis di dalam lingkungan SKPD yang menunjang kelancaran pemberian pelayanan publik. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang dibahas adalah kelancaran pelaksanaan program-program

pembangunan di wilayah Kota Palu. Pengelolaan Dana Bagi Hasil yang dibahas adalah pemanfaatan dana yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Palu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program kebijakan dana perimbangan tersebut tepat sasaran. Khusus untuk dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, yang dibahas dalam rapat antar instansi terkait, rapat internal dinas dan pertemuan antara instansi terkait dengan pihak ketiga tersebut, sebagian besar menekankan pada pembahasan program-program yang mengarah kepada pembangunan MDG's yaitu pembangunan yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia selaku penggerak utama pembangunan di Kota Palu. Program-program tersebut meliputi pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air bersih dan bidang lingkungan hidup. Kemudian dalam kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Palu yang disalurkan melalui pemberian bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, sebelum digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, mendanai program-program pembangunan yang ada serta mendanai kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kota Palu, maka terlebih dahulu para unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu yang diberikan kewenangan mengelola dana perimbangan tersebut, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat antar instansi terkait, rapat internal dinas dan

mengadakan pertemuan antara instansi terkait dengan pihak ketiga yang dilibatkan.

Berdasarkan pemaparan yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi telah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

Faktor Sumber Daya

Pada konteks ini, keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu ditinjau dari faktor sumber daya akan diukur dengan indikator intensitas kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal, kualitas kerja yang dihasilkan dan frekuensi memberikan usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah.

Sesuai dengan hasil observasi, bahwa para unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, selaku implementator sebelum mengelola dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk mendanai kegiatan administrasi SKPD, kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kota Palu, maka terlebih dahulu memberikan usulan dan pertimbangan sehubungan dengan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan SKPD tersebut yang diberikan kewenangan tanggung jawab untuk mengelola dana perimbangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa didalam frekuensi memberikan usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah, unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, selaku implementator memberikan penekanan kepada kualitas sumberdaya manusia yang dilibatkan di dalam pengelolaan dana perimbangan tersebut sehingga penyimpanan-penyimpangan di dalam pengelolaan-

nya dapat ditekan seminimal mungkin. Pentingnya peranan intensitas kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal, kualitas kerja yang dihasilkan dan frekuensi memberikan usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah dalam menunjang kesuksesan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, memberikan sebuah penggambaran bahwa informan penelitian memberikan apresiasi yang baik terhadap implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, yang dilihat dari tingginya intensitas kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal, kualitas kerja yang dihasilkan, frekuensi pemberian usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah. Dimana para unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu, selaku implementator didalam melaksanakan kegiatan administrasi, kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kota Palu yang didanai dari dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, selalu memberikan usulan dan pertimbangan jika dalam pengelolaan dana perimbangan tersebut ditemukan adanya hambatan-hambatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini ada kemampuan faktor sumberdaya yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu. Sesuai dengan kesimpulan di atas, tergambar bahwa implementator dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu memiliki kemampuan faktor sumberdaya yang baik dalam mendukung imple-

mentasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu, sehingga dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu dapat meneruskan perintah-perintah implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Palu secara cermat, jelas, dan konsisten. Peran sumberdaya sangat penting karena jika sebuah kebijakan tidak didukung dengan sumberdaya implementator yang baik maka harapan bahwa kebijakan akan dapat di implementasikan dengan baik tidak akan terwujud.

Faktor Disposisi/Watak

Pada konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu ditinjau dari faktor disposisi/watak akan diukur dengan indikator komitmen (tanggung jawab) dalam pelaksanaan kegiatan dan transparansi laporan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut di atas, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan penelitian berdasarkan pada pedoman wawancara yang ada untuk mengetahui tanggapan informan penelitian dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu terhadap seberapa besar peranan faktor disposisi/watak pada keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, maka peneliti melihat bahwa para unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu selaku implementator selalu memperlihatkan sebuah komitmen (tanggung jawab) yang kuat untuk melaksanakan semua

kegiatan administrasi, kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan di wilayah Kota Palu yang didanai dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana perimbangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, hasil observasi peneliti memperlihatkan pula bahwa unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu selaku implementator selalu transparan dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Transparansi terhadap laporan kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk pembuktian betapa pentingnya peranan faktor disposisi/watak dari unsur pimpinan SKPD selaku implementor dalam mensukseskan pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transparansi terhadap laporan kegiatan yang dilakukan, maka unsur pimpinan SKPD selaku implementor yang diberikan kewenangan mengelola anggaran yang bersumber dari dana perimbangan dapat memberikan pembuktian secara moril kepada publik akan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Palu yang sumber dananya dianggarkan dari dana perimbangan dalam bentuk bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan pertanggung jawaban yang akuntabel. Disisi lain, transparansi terhadap laporan kegiatan yang dilakukan, membuktikan pula adanya watak atau karakteristik yang kuat dalam diri unsur pimpinan SKPD selaku implementor yang diberikan kewenangan mengelola anggaran yang bersumber dari dana perimbangan menjalankan amanah dengan baik, dengan memberikan pembuktian secara yuridis (hukum) kepada Inspektorat Daerah, BPKP, BPK dan KPK selaku pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengaudit dan memeriksa kembali hasil penggunaan dana yang dianggarkan dari dana

perimbangan, sehingga ada watak atau karakteristik yang kuat ditunjukkan oleh unsur pimpinan SKPD selaku implementator untuk mempertanggung jawabkan secara yuridis (hukum) kegiatan yang dilakukan dengan akuntabel di mata hukum

Sesuai dengan kesimpulan, tergambar bahwa implementator dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu memiliki dukungan faktor disposisi/watak yang kuat dalam dirinya untuk mengimplementasikan kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu dengan penuh amanah dilandasi dengan kejujuran dan sikap komitmen yang tinggi sehingga proses pelaksanaan program kebijakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Palu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Peran faktor disposisi/watak yang kuat dalam diri implementator sangat penting karena jika sebuah kebijakan tidak didukung dengan watak implementator yang baik maka harapan bahwa kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik tidak akan terwujud.

Faktor Struktur Birokrasi

Pada konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu ditinjau dari faktor struktur birokrasi akan diukur dengan indikator kerjasama antar instansi terkait, kerjasama internal dinas dan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut di atas, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan penelitian berdasarkan pada pedoman wawancara yang ada untuk mengetahui seberapa besar peranan faktor struktur birokrasi dalam cerminan indikator kerjasama antar instansi terkait, kerjasama internal dinas dan kerja-

sama pemerintah dengan pihak ketiga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, maka peneliti melihat bahwa unsur pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu selaku implementator yang diberikan kewenangan untuk mensukseskan pengelolaan dana perimbangan di Kota Palu untuk mendanai kegiatan administrasi, kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibutuhkan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, selalu melakukan koordinasi dengan melakukan kerjasama antar instansi terkait, kerjasama internal dinas dan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama menyetukan visi dan misi didalam pengelolaan dana perimbangan tersebut. Kerjasama sama antar instansi terkait, kerjasama internal dinas dan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga tersebut biasanya diperlihatkan dengan adanya kesempatan untuk duduk bersama berdiskusi dan saling memberikan masukan dalam memikirkan pengelolaan dana perimbangan tersebut secara tepat sesuai dengan kebutuhan Kota Palu.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu telah berhasil terlaksana dengan baik, dilihat dari adanya dukungan dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi/watak dan struktur birokrasi didalam mendukung kesuksesan pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

2. Faktor komunikasi dalam cerminan rapat antar instansi terkait, rapat internal dinas, dan pertemuan instansi terkait dengan pihak ketiga yang paling kuat memberikan dukungan pada keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.
3. Faktor struktur birokrasi dalam cerminan kerjasama antar instansi terkait, kerjasama internal dinas, dan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga yang paling lemah memberikan dukungan pada keberhasilan implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah di Kota Palu.

DAFTAR RUJUKAN

- Bratakusumah dan Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Booth, A. 2003. *Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasikan Kebijaksanaan Perpajakan: Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan*, MacAndrews C, dan Amal I, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Wshington. DC: Congressional Quarterly Press.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta: UI-Pres.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- LAN RI. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. CV. Ghalia, Indonesia.
- Rondinelli D, McCullough J, and Jhonson R. 2005. "Analizysis Decentralitation Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework, Development and change" Vol. 20, no.1.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.